



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan;
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 23 September 2019
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Badan Pengawas Jaminan Sosoal (BPJS) Ketenagakerjaan Terhadap Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat	: Dede Yusuf M.E, ST, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A.orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI B. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 13.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

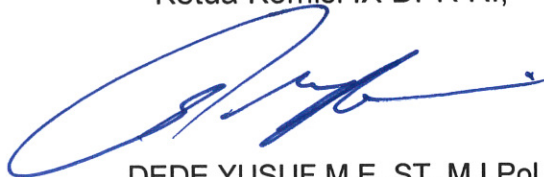
1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi hasil laporan pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan motivasi terhadap kinerja

dan kebijakan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

3. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan berkala secara tertulis dan periodik per 3 (tiga) bulan sekali dan jika ada hal-hal strategis yang mendesak kepada Komisi IX DPR RI terkait dengan hasil pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan koordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi pengawasan terhadap Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
5. Komisi IX DPR RI mendukung penancangan *call name* (sebutan) BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek dalam upaya mempermudah pengenalan program jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sesuai tupoksinya untuk mengakselerasi terlaksananya UU No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia per Oktober 2019.

Rapat diakhiri pukul 13.55 WIB.

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E. ST, M.I.Pol
A-415